

**PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
LINGKUP ZONA PERDAGANGAN BEBAS  
(*FREE TRADE ZONE*) DI BATAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh :**

**PRETTY SUZA  
07041181621027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2021**

# HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

## PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM LINGKUP ZONA PERDAGANGAN BEBAS (*FREE TRADE ZONE*) DI BATAM

### SKRIPSI

Disusun oleh :

Pretty Suza

07041181621027

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir  
Program Sarjana

Pembimbing I

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

NIP. 1979050112002121005

Pembimbing II

Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA

NIP. 199104092018032001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM LINGKUP ZONA  
PERDAGANGAN BEBAS (*FREE TRADE ZONE*) DI BATAM

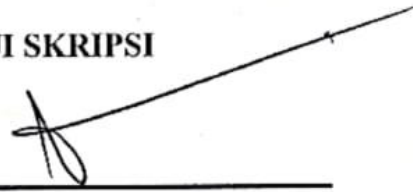
SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada  
Tanggal 26 November 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

Ketua



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA

Anggota



Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA

Anggota



Ferdiansyah R. S.IP., MA

Anggota



Indralaya, 26 November 2021

Mengesahkan,

Dekan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



★ Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

NIP.196601221990031004

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pretty Suza

NIM : 07041181621027

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Paradiplomasi Pemerintah Daerah Dalam Lingkup Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) Di Batam** " ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 6 September 2021

Yang membuat pernyataan



Pretty Suza

07041181621027

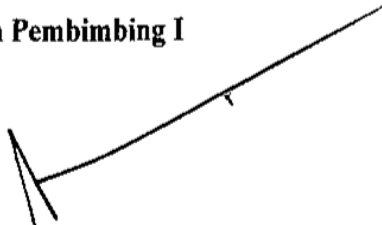
# PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM LINGKUP ZONA PERDAGANGAN BEBAS (*FREE TRADE ZONE*) DI BATAM

Oleh:  
Pretty Suza  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Sriwijaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan perekonomian Batam khususnya dalam hal investasi asing. Batam sendiri merupakan salah satu pemerintah subnasional di Indonesia yang melakukan aktivitas hubungan internasional dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan konsep paradiplomasi dari Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Batam kepada negara yang bekerjasama menitikberatkan pada sektor ekonomi dan pertukaran informasi berbagai bidang. Berbagai hal seperti adanya kemudahan prosedur investasi dan pemberian berbagai fasilitas serta layanan di tempat wisata yang diberikan Batam menciptakan suasana yang baik yang dapat dilihat pada peningkatan investasi serta bertambahnya kerjasama dari perusahaan asing setiap tahunnya.

**Kata Kunci :** Paradiplomasi, Batam, Free Trade Zone, Pemerintah Daerah

Dosen Pembimbing I



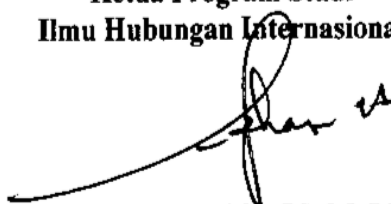
Dr. Andries Lionardo, S.JP., M.Si  
NIP. 197905012002121005

Dosen Pembimbing 2



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA  
NIP. 199104092018032001

Ketua Program Studi  
Ilmu Hubungan Internasional



Dr. Azhar SH, M.Sc., LL.M., LL.D  
NIP. 1965042719893100

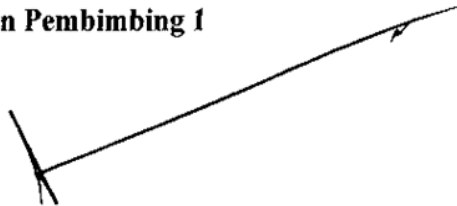
# LOCAL GOVERNMENT PARADIPLMACY WITHIN THE SCOOP OF FREE TRADE ZONE IN BATAM

Oleh:  
Pretty Suza  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Sriwijaya

This study aims to determine the paradiplomacy efforts carried out by the Batam City government to improve Batam's economy, especially in terms of foreign investment. Batam itself is one of the sub-national governments in Indonesia that carries out international relations activities with several neighboring countries such as Singapore and South Korea. This study uses descriptive qualitative research methods and uses the concept of paradiplomacy from Alex Sergunin and Pertti Joenniemi. The data used by the author in this study is secondary data. The results of the study indicate that the paradiplomacy carried out by Batam City focuses on the economic sector and the exchange of information in various fields. Various things such as the ease of investment procedures and the provision of various facilities and services at tourist attractions provided by Batam create a good atmosphere which can be seen from increased investment and increased cooperation from foreign companies every year.

**Keywords:** Paradiplomacy, Batam, Free Trade Zone, Local Government

**Dosen Pembimbing 1**



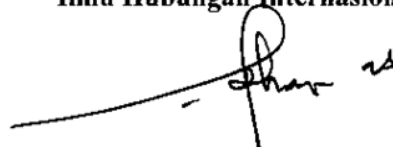
**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si**  
NIP. 197905012002121005

**Dosen Pembimbing 2**



**Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA**  
NIP. 199104092018032001

**Ketua Program Studi  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Dr. Azhar SH., M.Sc., LL.M., LL.D**  
NIP. 1965042719893100

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya pajatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul Paradiplomasi Pemerintah Daerah Dalam Lingkup Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) Di Batam. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang memberikan saya kesempatan serta kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua, ayah Mustari S.Pd dan ibu Ir. Suarni M.TPd beserta saudara kandung, kakak Drh. Prima Nittha dan adik Rimba Cahaya Mustika penulis yang selalu mendukung dalam keadaan susah maupun senang, serta memberikan motivasi dan juga doa sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.

7. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing Kedua yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.
8. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
10. Admin HI Indralaya (Mba Sisca dan Kak Dimas) yang membantu penulis dalam penyelesaian administrasi kampus selama masa perkuliahan.
11. Teman-Teman Seangkatan 2016 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Indralaya
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis berharap skripsi ini menjadi karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendorong kita untuk melakukan penelitian yang lebih baik dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

Palembang, Oktober 2021

Penulis,

Pretty Suza



## DAFTAR ISI

Halaman

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....              | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN.....           | ii   |
| LEMBAR ORISINALITAS.....         | iv   |
| ABSTRAK .....                    | v    |
| ABSTRACT .....                   | vii  |
| KATA PENGANTAR.....              | viii |
| DAFTAR ISI .....                 | ix   |
| DAFTAR TABEL .....               | xi   |
| DAFTAR GAMBAR.....               | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....            | xiii |
| BAB I.....                       | 1    |
| PENDAHULUAN .....                | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....         | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....         | 5    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....      | 6    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....     | 6    |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis.....      | 6    |
| 1.4.2 Manfaat Praktis .....      | 6    |
| 1.5 Tinjauan Pustaka.....        | 7    |
| 1.6 Landasan Konseptual .....    | 12   |
| 1.6.1. Paradiplomasi .....       | 12   |
| 1.7. Alur Pemikiran.....         | 17   |
| 1.8. Argumen Utama.....          | 18   |
| 1.9 Metode Penelitian .....      | 18   |
| 1.9.1 Desain Penelitian .....    | 18   |
| 1.9.2 Definisi Konsep .....      | 19   |
| A. Perdagangan Bebas .....       | 19   |
| 1.9.3 Fokus Penelitian.....      | 23   |
| 1.9.4 Unit Analisis .....        | 24   |
| 1.9.5 Jenis dan Sumber Data..... | 24   |

|  |    |
|--|----|
| A. Jenis Data .....  | 24 |
| B. Sumber Data.....  | 24 |
| 1.9.6 Teknik Pengumpulan Data .....  | 25 |
| 1.9.7 Teknik Keabsahan Data .....  | 25 |
| BAB II .....   | 28 |
| GAMBARAN UMUM .....  | 28 |
| 2.1 Tentang Batam .....  | 28 |
| 2.2 Sejarah Batam .....  | 31 |
| 2.3 Sejarah Perkembangan dan Pembentukan Batam.....  | 36 |
| 2.4 <i>Free Trade Zone</i> .....   | 40 |
| 2.5 Dinamika Perkembangan Batam Menjadi Kawasan Perdagangan Bebas ( <i>Free Trade Zone</i> ) ..... | 43 |
| BAB III.....   | 49 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN .....   | 49 |
| 3.1 Membuat Fondasi Legal .....  | 49 |
| 3.2 Menggunakan Treaty-making Power.....   | 49 |
| 3.3. Menarik Investor Asing dan Mempromosikan Proyek Bersama .....                                 | 64 |
| 3.4. Membuat citra positif keluar negeri .....   | 76 |
| 3.5. Meningkatkan Keterikatan.....   | 81 |
| BAB IV .....   | 83 |
| KESIMPULAN DAN SARAN .....   | 83 |
| 4.1 Kesimpulan .....   | 83 |
| 4.2 Saran .....  | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 85 |
| LAMPIRAN.....  | 90 |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....                            | 7       |
| Tabel 1.2. Fokus Penelitian.....                                | 23      |
| Tabel 2.1. Perkembangan Status Batam.....                       | 37      |
| Tabel 3.1. Jumlah Wisatawan Asing di Batam Tahun 2018-2020..... | 75      |
| Tabel 3.2. Kegiatan promosi Batam tahun 2011-2017.....          | 78      |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1. Peta Kepulauan Riau.....   | 3       |
| Gambar 2.1. Peta Batam.....  | 28      |
| Gambar 3.1. Panel surya di atas genangan Waduk Duriangkang.....                  | 52      |
| Gambar 3.2. Penampakan panel surya di atas genangan Waduk Duriangkang.....       | 53      |
| Gambar 3.3. Proses MoU pihak Sunseap.....  | 53      |
| Gambar 3.4. Proses MoU pihak BP Batam.....                                       | 54      |
| Gambar 3.5. Proses Penandatanganan (MoU) oleh pihak BP Batam dan Sunseap Group.. | 54      |
| Gambar 3.6. Proses Penandatanganan (MoU) oleh pihak Sunseap Group.....           | 55      |
| Gambar 3.7. Penunjukan MoU Sunseap grup dan BP Batam.....                        | 55      |
| Gambar 3.8. Penyambutan Perwakilan Kota Gimjae.....                              | 61      |
| Gambar 3.9. Penandatanganan MoU Oleh Walikota Batam.....                         | 61      |
| Gambar 3.10. Penandatanganan MoU Oleh Perwakilan Kota Gimje.....                 | 62      |
| Gambar 3.11. Kunjungan Perwakilan Kota Batam di Gimje.....                       | 63      |
| Gambar 3.12. Kunjungan perwakilan Kota Gimje di Batam.....                       | 63      |
| Gambar 3.13. Penandatanganan MoU.....  | 67      |
| Gambar 3.14. Penandatanganan MoU dengan PT. Indonesia Optic Technology.....      | 68      |
| Gambar 3.15. Pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2000-2010 dalam persen.....         | 69      |
| Gambar 3.16. Inflasi Kota Batam, Desember 2015 s.d Desember 2016.....            | 69      |
| Gambar 3.17. Perkembangan Investasi di Batam Tahun 2016-2020.....                | 70      |
| Gambar 3.18. Kawasan Monumen Welcome to Batam.....                               | 72      |
| Gambar 3.19. Kawasan Hotel dan Golf Radison.....                                 | 72      |
| Gambar 3.20. Kawasan Resort Nongsa Point Marina.....                             | 73      |
| Gambar 3.21. Dermaga Yacht Nongsa Point Marina.....                              | 73      |
| Gambar 3.22. KTM Resort.....   | 74      |
| Gambar 3.23. Kalender Event di Batam tahun 2020.....                             | 75      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1.1. Halaman Persetujuan Pembimbing..... | ii      |
| Lampiran 1.2. Lembar Orisinalitas.....            | iii     |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan bebas dilakukan untuk memudahkan antar negara dalam kerjasama perdagangan sehingga meningkatkan arus lalu lintas antar negara serta mengurangi berbagai hambatan untuk menghasilkan hasil yang efektif (S. Hidayat & Hidayat, 2010). Dalam situasi ini, yakni memberikan dorongan terhadap negara-negara untuk melakukan investasi di wilayah-wilayah baru di bidang ekonomi. Kemudahan dalam melintasi batas-batas negara, setiap negara memiliki aturan yang berbeda dalam menghadapi tantangan persaingan ekonomi yang selektif. Adanya perkembangan globalisasi dan liberalisasi yang terjadi pada masa sekarang, memudahkan dalam melakukan perdagangan melewati lintas batas antar negara.

Pemerintah Indonesia memahami di dunia Internasional, diplomasi tidak bisa hanya berlandaskan pada negara saja, tetapi juga bisa pada aktor-aktor negara dalam hubungan Internasional salah satunya yaitu Pemerintah Daerah. Paradiplomasi memberikan kontribusi Pemerintah Daerah sebagai sub sektor dalam melakukan kemajuan ekonomi di daerahnya melalui diplomasi ekonomi dengan memanfaatkan peluang kerjasama Internasional yang berperan serta dalam kepentingan daerahnya. Kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang diberikan Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pujayanti, 2016).

Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan salah satu *stakeholder* dalam pelaksanaan otonomi daerah. Memberikan peluang pada masuknya investor asing, serta dapat

meningkatkan nilai ekspor pada daerah tersebut. Peran Pemda diperlukan dalam pengelolaan investasi asing di daerahnya dengan mematuhi secara legal. Pembentukan badan-badan terkait dengan pengelolaan investasi di daerah bertujuan untuk dapat memaksimalkan kapabilitas yang dimiliki, mengembangkan aturan dan produk hukum bagi investor tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah semestinya dapat memiliki daya serap yang tinggi untuk menyelenggarakan investasi asing bagi kemajuan pembangunan daerahnya melalui aktif berdiplomasi ataupun berbisnis Internasional (Jatmika, 2001).

Kemampuan Pemda dalam kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan kerjasama dalam level G to G, G to NGOs, G to B guna mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi (Fathun, 2016). Dalam hubungan internasional, Pemerintah Daerah menjadi aktor sentral dalam pentingnya pelaksanaan kerjasama lintas perbatasan yang berdekatan dengan negara tetangga bagi memperluas perdagangan serta menarik investasi asing untuk menyejahterakan negara ataupun daerahnya (Tavares, 2016).

Paradiplomasi sendiri adalah sebuah fenomena baru di hubungan internasional yang ada di awal abad ke 20-an. Perkembangan globalisasi menjadikan tidak adanya batasan antara urusan dalam negeri dan luar negeri. Semakin banyak keterlibatan Provinsi dalam kerjasama lintas perbatasan menandakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sektoral yang berdekatan dengan negara tetangga (Tavares, 2016).

Menurut Ivo Duchacek, terdapat beberapa tipe paradiplomasi. Pertama, *transborder paradiplomacy*, menunjuk pada hubungan institusional, baik formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis. Kerjasama ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah di antara mereka. Kedua, *transregional paradiplomacy*, hubungan

diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung, namun negara di mana kedua pemerintahan sub nasional tersebut berada berbatasan langsung dalam satu kawasan. Ketiga, *global paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia. Tiga bentuk paradiplomasi ini sangat mungkin berkembang serta memberi kontribusi untuk memperkuat dan melengkapi pada kinerja diplomasi pemerintah pusat (Pujayanti, 2016).

Potensi berbeda yang dimiliki oleh setiap daerah memberikan dorongan investor untuk ingin lebih memperluas potensi tersebut. Dengan demikian, di era desentralisasi sekarang ini, pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada daerah untuk mengatur daerah otonomnya sendiri. Maka bagi daerah yang tidak sempat berkembang oleh Pemerintah Pusat, dapat mengupayakan kesempatan kerjasama luar negeri yang dijalankan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur pengawasan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Luar Negeri.

Gambar 1.1  
Peta Kepulauan Riau



Sumber: Pemerintah Kota Tanjungpinang



Berdasarkan letak geografisnya, Batam termasuk kedalam Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia dan Vietnam. Luas wilayahnya 251.810,71 km<sup>2</sup>, mayoritas dikelilingi oleh lautan sebanyak 96% dan memiliki sekitar 1.350 pulau besar dan kecil untuk menetapkan aktivitas pembangunan, kemasyarakatan serta pemerintahan. Ibukota provinsi Kepulauan Riau adalah Tanjungpinang. Letak yang strategis menjadikan provinsi ini sebagai wilayah yang memiliki peluang besar pada pasar internasional yang dimiliki oleh Indonesia, serta berada pada posisi jalur lintas transportasi laut dan udara terpadat di tingkat Internasional (Kepri, 2014).

Dilihat dari gambar, Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dapat dimanfaatkan dalam menarik investasi asing. Perkembangan Batam yang sebelumnya merupakan pulau yang kosong, sekarang telah menjadi kota industri yang dapat berkompetitif dengan wilayah-wilayah industri lainnya di Indonesia. Terletak pada Selat Malaka sebagai jalur perlintasan pelayaran Internasional memberikan pengaruh pada sektor kegiatan perekonomian seperti investasi, produksi industri, serta didukung ketersediaan tenaga kerja yang memadai dari wilayah tersebut ataupun sekitarnya. Bahkan Batam mempunyai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sehingga hal ini diminati oleh para investor lokal maupun asing. Industri di Batam saat ini berorientasi mayoritas pada ekspor baik yang berupa relokasi maupun investasi baru. Misalnya, negara Singapura yang memiliki lahan terbatas ingin memperluas sektor industri yang dimiliki negaranya. Batam dan pulau-pulau sekitarnya menjadi alternatif sebagai tempat relokasi bagi Singapura untuk melakukan penanaman modal.

Perkembangan perdagangan bebas di Batam dapat dilihat melalui penandatanganan *Framework Agreement on the Economic Cooperations in the Islands of Batam, Bintan and Karimun* pada tanggal 26 Juni 2006 tentang kerjasama dengan Singapura dalam

pengembangan wilayah *Free Trade Zone* (FTZ) Batam yang dilaksanakan di Nongsa Point Marina Kota Batam. Menegaskan bukti pemerintah yang serius dalam perkembangan yang terjadi pada perdagangan bebas Batam. FTZ Batam menjadi “*go-international fact*” yakni menjadi komoditas kawasan yang siap mempromosikan dan berkompetisi di pasar ekonomi global.

Diperkuat dengan pembentukan JSC (*Joint Steering Committee*) dan JWG (*Joint Working Group*) antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Berlandaskan pada kerjasama antar Singapura dan Indonesia yang dilimpahkan pada kewenangan daerah dalam pengembangan kawasan provinsi Kepulauan Riau diharapkan bukan hanya untuk meningkatkan pada sektor politik dan pemerintahan saja akan tetapi juga pada sektor pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tanggung jawab bersama dalam pembangunan FTZ yang terintegrasi dibuktikan dengan akses Singapura melalui EDB (*Economic Development Board*). Serta terdapat kantor Konsultan Singapura di Kota Batam (Bahrum, 2008).

Dampak dari perdagangan bebas ini meningkatkan iklim investasi yang cukup signifikan di Kepulauan Riau terkhusus wilayah Batam. Kontribusi perekonomian yang diberikan pada daerah maupun nasional bagi pengusaha asing, pengusaha lokal, pemerintah, serta penduduk setempat dapat memiliki peluang yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan (Apriliyanti, 2015). Maka, penulis akan melihat lebih lanjut bagaimana pemerintah daerah Batam dapat mengambil peluang dan berperan secara langsung untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerah melalui kajian paradiplomasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu:  
**“Bagaimana Paradiplomasi Pemerintah Daerah Dalam Lingkup Zona Perdagangan Bebas (FTZ) di Batam?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan paradiplomasi Pemerintah Daerah dalam lingkup zona perdagangan bebas di Batam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam kajian ilmu studi Hubungan Internasional yaitu pada level individu dan guna memperluas pengetahuan para akademisi terkait dengan paradiplomasi pemerintah daerah dalam lingkup zona perdagangan bebas (FTZ) di Batam.
2. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan memperluas khasanah kajian Ilmu Hubungan Internasional bagi para akademisi yang menekankan pada bagaimana paradiplomasi pemerintah daerah dalam lingkup zona perdagangan bebas (FTZ) di Batam.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Peneliti mampu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam selama melaksanakan penelitian dan kajian pustaka paradiplomasi pemerintah daerah dalam lingkup zona perdagangan bebas (FTZ) di Batam.
2. Meningkatkan analisa berpikir secara kritis dengan menerapkan ilmu yang didapat sehingga dapat meluasnya pengetahuan peneliti dan dapat meningkatkan semangat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sebuah gambaran bagi pembaca, sehingga mengetahui bagaimana paradiplomasi pemerintah daerah dalam lingkup zona perdagangan bebas (FTZ) di Batam.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka yang diambil dari berbagai jurnal penelitian terdahulu, diharapkan dapat membantu peneliti guna memperdalam pemahaman mengenai isu dan permasalahan yang diteliti.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian Terdahulu | Keterangan   |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama Penulis         | Rizqi Apriani Putri  |
|    | Judul                | Menakar Paradiplomasi Batam dalam Lingkup <i>Free Trade Zone</i> melalui Analisis Isi Regulasi   |
|    | Nama Jurnal          | Vol. 3. No. 2, December 2019 ISSN: 2614-0535, E-ISSN: 2655-1330  |
|    | Tahun                | 2019   |
|    | Hasil Penelitian     | Jurnal ini membahas mengenai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berlaku selama 70 tahun. Berdasarkan dari tabel indikator tata kelola perdagangan bebas, tata kelola di batam masih bersifat disinvestasi dengan persentase 70% dibandingkan yang pro-investasi yang hanya sebesar 30%. Yang memiliki arti meskipun beberapa regulasi mengenai investasi asing sudah |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | berlaku, regulasi tersebut masih kurang memberikan keleluasaan terhadap investasi asing.  |
|    | Perbandingan     | Jurnal ini membahas mengenai paradiplomasi pemerintah daerah Batam yang telah berjalan dalam lingkup Zona Perdagangan Bebas dengan menganalisis isi regulasi yang berlaku. Sedangkan penulis hanya akan fokus membahas mengenai Paradiplomasi pemerintah Batam terkait pemberian status Free Trade Zone (FTZ) oleh pemerintah pusat terhadap wilayah Batam.   |
| 2. | Nama Penulis     | Muhammad Zaenuddin, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, dan Agus Heruanto Hadna   |
|    | Judul            | Praktek Otonomi Daerah di Batam: Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan <i>Free Trade Zone</i> (FTZ)   |
|    | Nama Jurnal      | Seminar Nasional Cendekiawan ke 3 Tahun 2017  |
|    | Tahun            | 2017  |
|    | Hasil Penelitian | Kota Batam merupakan wilayah <i>Free Trade Zone</i> (FTZ) berdasarkan kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Batam dalam rangka untuk peningkatan daya saing global terutama untuk menarik investasi di Batam. Regulasi khusus yang diberikan kepada Batam mendukung sepenuhnya perkembangan ekonomi Batam dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Setelah ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, muncul persoalan dualisme kepemimpinan dan kewenangan antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam termasuk kelambanan pemerintah dalam menyusun dan merevisi regulasi Kawasan |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ( <i>Free Trade Zone</i> ) yang berdampak terhadap penurunan perekonomian dan investasi di Batam.   |
|    | Perbandingan     | Jurnal ini memfokuskan pada pembahasan mengenai persoalan dualisme kepemimpinan dan kewenangan antara otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Sedangkan penulis hanya akan fokus pada paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah Batam.  |
| 3. | Nama Penulis     | Hermi Susiatiningsih, Nadia Farabi, Satwika Paramasatya, dan Sheiffi Puspapertiwi   |
|    | Judul            | Memperkuat Lokalitas Kota Semarang di Era Globalisasi Melalui Diplomasi Lokal   |
|    | Nama Jurnal      | ICENIS 2018   |
|    | Tahun            | 2018  |
|    | Hasil Penelitian | Sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki lokalitas yang dapat digunakan sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan pembangunan kota. Sem'Biz dan Semarang Pesona Asia merupakan bukti kemajuan di Semarang karena pengaruh era globalisasi dan juga modernisasi. Lokalitas dan paradiplomasi pemerintah daerah bersatu untuk melakukan diplomasi dengan beberapa wilayah lain. Kota Semarang sendiri bisa menjadi refleksi pembangunan di Jawa Tengah. Sistem desentralisasi telah mendorong munculnya paradiplomasi sebagai hal penting dalam pemerintah daerah di era belakangan ini. |
|    | Perbandingan     | Perbedaan terletak pada objek penelitian. Pada jurnal ini, yang menjadi objek utama dari penelitian adalah Kota Semarang. Sedangkan, yang akan  |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
|              |   | menjadi objek penelitian dari peneliti adalah Kota Batam.  |
| 4.           | Nama Penulis  | Ahmad Harakan  |
|              | Judul   | Paradiplomasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dan Sosial Di Kabupaten Bantaeng  |
|              | Nama Jurnal   | Jurnal PIR Vol.3 No. 1 Agustus 2018  |
|              | Tahun   | 2018   |
|              | Hasil Penelitian  | Pemerintah Kabupaten Bantaeng memanfaatkan momen dan peluang pengembangan potensi dan akselerasi pembangunan dengan melakukan perluasan jejaring internasional melalui praktik paradiplomasi. Meski seringkali mendapatkan hambatan, utamanya diawal pemerintahan Nurdin Abdullah sebagai Bupati, dimana kondisi Kabupaten Bantaeng dalam perhitungan statistik dan tampilan fisik mendapatkan respon negatif dan dianggap sulit dipasarkan. Namun berbekal integritas kepemimpinan, relasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip pembelajaran dan pengembangan relasi yang lebih luas melalui jejaring internasional ternyata dapat memberi output pada akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan sosial di Kabupaten Bantaeng. |
| Perbandingan | Jurnal ini menjelaskan mengenai praktik paradiplomasi yang terjadi di Kabupaten Bantaeng yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan akselerasi pembangunan. Perbedaan terletak pada objek penelitian. Pada jurnal ini, yang menjadi |  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | objek utama dari penelitian adalah Kabupaten Bantaeng. Sedangkan, yang akan menjadi objek penelitian dari peneliti adalah Kota Batam.   |
| 5. | Nama Penulis     | Laode Muhamad Fathun  |
|    | Judul            | Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar   |
|    | Nama Jurnal      | Indonesian Perspective Volume 1 Nomor. 1 (Januari-Juni): 75-94  |
|    | Tahun            | 2016  |
|    | Hasil Penelitian | Salah satu peran yang dimainkan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai aktor ‘paradiplomasi’ adalah menciptakan sebuah kota yang berbasis internet. Kota yang disebut smart city ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat pada pelayanan yang cepat dan tepat serta mudah dijangkau. Praktek smart city di Makassar sendiri melibatkan para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.  |
|    | Perbandingan     | Jurnal ini memfokuskan pada pembahasan paradiplomasi pemerintah kota Makassar yang menciptakan sebuah kota berbasis internet untuk meningkatkan iklim investasi asing. Sedangkan peneliti akan membahas mengenai paradiplomasi pemerintah Batam dimana akan memanfaatkan status kawasan perdagangan bebas yang di pegang oleh Batam untuk meningkatkan investasi asing dengan menggunakan beberapa indikator. Selain itu terdapat perbedaan objek penelitian antara Makassar dan Batam. |



## 1.6 Landasan Konseptual

### 1.6.1. Paradiplomasi

Istilah *Paradiplomacy* sendiri pertama kali diperkenalkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuan asal Basque, Panayotis Soidatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel diplomacy* yang kemudian menjadi *paradiplomacy* yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*' menurut Aldecoa, Keating dan Boyer dan menurut Ivo Duchacek yaitu *micro diplomacy*, dimana paradiplomasi ini adalah sebuah geliat partisipasi pemerintah daerah otonom untuk ikut berkiprah secara internasional (Wolff, 2009).

Paradiplomasi sendiri merupakan fenomena yang baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*' atau pemerintah regional yaitu pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Keterlibatan aktor-aktor Internasional dalam melakukan kerja sama Internasional bukan hanya negara saja melainkan MNCs, INGOs, Individu-Individu, Pemerintah Daerah dan peran serta berbagai aktor lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Konsep paradiplomasi sendiri adalah sebuah bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara dan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran aktor sub-nasional dalam diplomasi;
2. Penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor sub-nasional;
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab kepentingan bersama dalam keselarasan,

4. Memaksimalkan proses pencapaian kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah, dalam berbagai bentuknya.

Secara historis sebelum UU Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan kerjasama internasional termasuk didalam UU Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 yang dikenal dengan dengan UU Otonomi Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan kerjasama luar negeri tidak wajib bagi daerah (Mukti, 2013). Di era transnasional Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan kerjasama luar negeri dengan berinteraksi secara luas dengan negara lain. Kontribusi dari peran aktor lokal dalam melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, menunjukkan bahwa pandangan terhadap kedaulatan negara berganti secara fundamental.

Kewenangan untuk melakukan hubungan Internasional bagi Pemerintah Daerah bersifat tidak wajib, akan tetapi dengan perkembangan globalisasi yang semakin maju, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan ini. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pemerintahan dalam pengambil keputusan kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan, jika tidak berelaborasi terhadap tren yang terjadi dalam dunia Internasional akan menyebabkan ketertinggalan. Daerah yang tidak terampil memanfaatkan peluang kemungkinan ketinggalan dan hanya menjadi konsumen pasif saja dari berbagai kapitalisme global atau sistem perdagangan Internasional (Mukti, 2013).

Pada situasi inilah, Pemda diberikan kewenangan atau kesempatan oleh negara untuk berinteraksi secara langsung saat melaksanakan kerja sama Internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 berlakunya UU ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta berkembang secara pesat.

Kapabilitas dari Paradiplomasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan upaya Pemerintah Daerah di bidang hubungan luar negeri melalui perkembangan diplomasi multijalur (*multitrack diplomacy*). Diplomasi multijalur memberikan andil pada berkurangnya berbagai halangan yang dilalui dalam pelaksanaan politik luar negeri hingga dapat menjalin kerjasama Internasional maupun domestik pada saat menjalan diplomasi (Pujayanti, 2012). Paradiplomasi sendiri adalah instrument dari pembangunan. Dengan demikian dalam membuat kebijakan paradiplomasi harus teliti karena kewenangan ini bersifat kooperatif ataupun menimbulkan konflik dengan Pemerintah Pusat. Kondisi sosial, ekonomi serta politik dapat mempengaruhi akan kebijakan Paradiplomasi yang ada di daerah.

Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi di dalam tulisannya yang berjudul "*Paradiplomacy as a Capacity Building Strategy The Case of Russia's Northwestern Subnational Actors*" mengemukakan dua jenis metode dan strategi paradiplomasi yaitu secara langsung dimana daerah akan mengembangkan aktivitas paradiplomasinya sendiri dan tidak langsung yaitu di mana daerah akan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri federal. Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi menjelaskan terdapat total 7 strategi paradiplomasi dalam metode secara langsung, yaitu *Creating a Legal Foundation, Using the Power to Make Treatie, Establishing Representative Offices in Foreign Countrie, Attracting Foreign Investment & Promoting Joint Projects, Constructing a Positive Image Abroad, Cooperating with International Organizations* dan *Increasing Familiarity*.

Di penelitian ini, peneliti menggunakan metode secara langsung yang dipaparkan oleh Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi dengan hanya 4 strategi dalam menganalisis aktivitas paradiplomasi pemerintah daerah Batam dikarenakan 3 strategi lainnya tidak dapat digunakan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi regional daerah yang diteliti. Dalam hal ini metode seperti membuat fondasi legal tidak dilakukan oleh pemda Batam melainkan

oleh Pemerintah Pusat. Membentuk kantor *representative* di luar negeri dan bekerjasama dengan Organisasi Internasional juga tidak dilakukan oleh pemda Batam dikarenakan pemda Batam masih fokus untuk mengembangkan dan membangun kawasannya sendiri serta masih terbatas pada kerjasama dengan negara lain, dan kerjasama dengan organisasi internasional belum menjadi hal yang diutamakan oleh pemda Batam. Beberapa metode langsung yang digunakan penulis terdiri atas:

#### 1. Menggunakan *treaty-making power*

Aktor subnasional cenderung menggunakan power yang dimilikinya untuk membuat *treaties* dengan negara lain atau aktor subnasional dari negara lain. Luas wilayah, sosio ekonomi dan potensi budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas dari pembuatan *treaties* oleh aktor subnasional. Contohnya ialah, St. Petersburg, sebuah wilayah metropolitan besar dengan populasi dan potensi ekonomi yang sama atau bahkan lebih besar dari negara tetangganya yaitu negara Baltik dan Nordik, dimana negara ini memiliki lusinan perjanjian kerjasama dengan mitra asing.

St. Petersburg sendiri telah diizinkan untuk menandatangani berbagai perjanjian tidak hanya dengan unit subnasional asing saja tetapi juga bisa dengan pemerintah nasional negara asing. Dalam hal ini, St. Petersburg telah membuat perjanjian dengan pemerintah (atau kementerian tertentu) di Austria (2011), Belarus (2012), Lituania (2010), Tajikistan (2010), dan Turkmenistan (2011).

#### 2. Menarik investasi asing dan mempromosikan proyek bersama

Di Russia, beberapa daerah telah berhasil dalam menciptakan kondisi yang baik untuk investasi asing seperti pajak yang rendah dan pejabat lokal yang antusias. Semakin “ramah

investasi” suatu daerah, maka akan semakin mudah daerah tersebut untuk menarik investasi asing yang berdampak pada peningkatan FDI (*Foreign Direct Investment*) di daerah tersebut.

### 3. Membuat citra positif

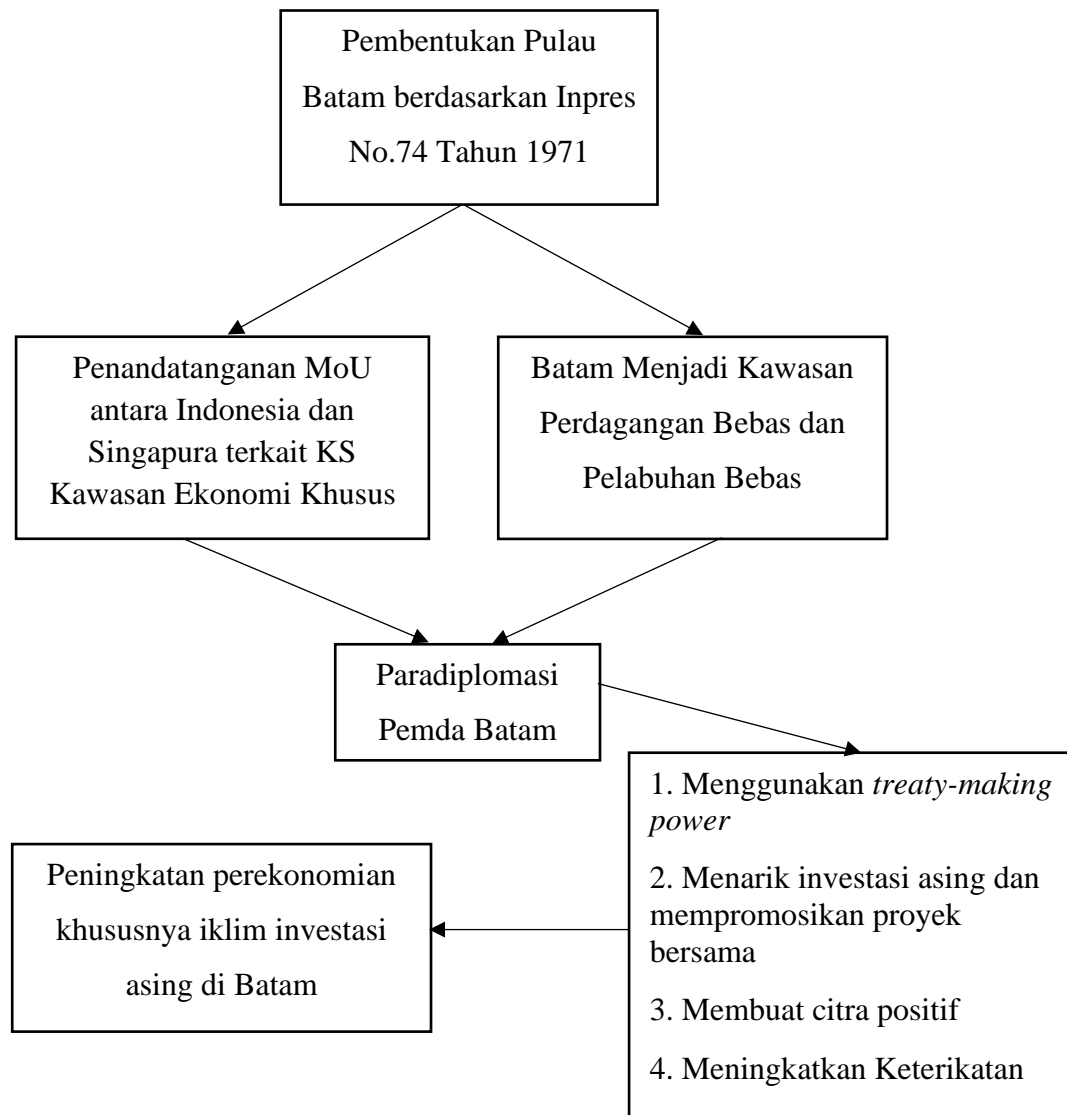
Untuk menarik investasi asing, daerah di Russia melakukan sesuatu melalui kampanye hubungan masyarakat. Dalam hal ini mereka melakukan pameran, mengadakan “*cooperation days*” atau festival dengan kota kembar mereka, ikut serta dalam pertemuan internasional, dan menaruh iklan pada media dari mitranya. Selain itu, pemimpin daerah dan kota melakukan perjalanan keluar negeri secara regular sebagai usaha untuk hubungan masyarakat. Bahkan beberapa daerah ada yang membuat website bilingual yang berorientasi untuk para orang asing. Tujuan utama dari kampanye tersebut adalah untuk mempromosikan citra dari aktor daerah sebagai platform yang kreatif dan inovatif, bukan sebagai area yang terpencil dan tertekan.

### 4. Meningkatkan Keterikatan

Keterikatan merupakan hal yang penting dalam menjalin hubungan internasional oleh aktor subnasional. Strategi keterikatan sangat bergantung pada persamaan sejarah. Bentuk dari persamaan sejarah ini misalnya kesamaan kebangsaan, ras, bahasa, budaya, kedekatan wilayah, sama-sama wilayah jajahan dari penjajah yang sama maupun persamaan cerita masa lalu.

## 1.7. Alur Pemikiran

Kota Batam merupakan salah satu kota yang memiliki letak strategis dikarenakan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Keberhasilan Pemerintah Batam dalam melakukan Paradiplomasi dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Batam.



Sumber: Diolah oleh penulis, berdasarkan Metode & Strategi Paradiplomasi secara langsung oleh Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi

## **1.8. Argumen Utama**

Batam yang termasuk kedalam Kepulauan Riau adalah wilayah yang memiliki letak strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang menjadikan provinsi ini sebagai wilayah yang memiliki peluang besar pada pasar internasional yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Batam sebagai aktor Paradiplomasi mempunyai peran untuk mensejahterakan wilayahnya dan meningkatkan perekonomian yang dapat membuka peluang masuknya investasi lebih besar di kawasan Batam dengan menggunakan beberapa Indikator diantaranya, menciptakan kondisi yang baik di wilayah Batam untuk menarik minat para investor asing agar mau menanamkan modalnya di Batam, dan membuat perjanjian dengan wilayah lain.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007).

Desain penelitian dalam penelitian dengan judul “Paradiplomasi Pemerintah Daerah dalam Lingkup Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) di Batam ini menggunakan metode kualitatif karena data yang digunakan oleh peneliti banyak berupa kalimat, kata dan frasa.

## 1.9.2 Definisi Konsep

### A. Perdagangan Bebas

Globalisasi menjadikan semua negara dapat terhubung dengan negara lainnya. Hal ini, menjadikan semakin mudahnya interaksi dan intensitas yang tinggi, berbagai aktor yang terlibat dalam dunia Internasional lebih terbuka tanpa ada lagi pembatasan-pembatasan. Arus globalisasi salah satunya membuka peluang dalam perdagangan bebas (*free trade*). Adam Smith berpendapat bahwa dengan adanya perdagangan bebas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta keterbukaan terhadap persaingan. *Free Trade Zone* (FTZ) merupakan suatu kawasan yang memperoleh fasilitas istimewa di bidang kepabeanan dan perpajakan (*Customs and Taxes Privelege Facilities*). Dalam *Kyoto Convention, Specific Annex D, Chapter 2 Guidelines on free zones, Clause 3 Definition*:

*“free trade” means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.*

Fasilitas istimewa yang dimiliki *free trade zone* yaitu pembebasan pengenaan Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Cukai, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (Muliono, 2003,). Sejarah FTZ di Indonesia, bermula pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2000 yang kemudian menjadi UU No 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)-FTZ



dan FPZ (*Free Port Zone*) yang kemudian muncul FTZ-FPZ Sabang (Aceh) dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 (Bahrum, 2011).

Implementasi dari FTZ harus disesuaikan dengan sosial budaya yang terjadi di Indonesia dengan tujuan memperoleh hasil yang efektif dalam pelaksanaannya serta tidak menimbulkan hambatan yang signifikan. Wilayah perbatasan secara sosial budaya yang identik dengan investasi asing. Jika dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tepat, maka memberikan pembangunan berkelanjutan yang lebih efisien terhadap masyarakat.

Indikator FTZ bukan hanya berisi pertumbuhan investasi, peningkatan ekspor/GNP, peningkatan PDRB, namun membantu pada perekonomian daerah tersebut seperti membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, peningkatan permintaan bahan baku lokal, keterlibatan UMKM serta berbagai bidang keilmuan yang berelaborasi terhadap pengembangan wilayah di sekelilingnya (Bappenas, 2009).

Indonesia dan Singapura merupakan negara di kawasan Asia Tenggara. Kedua belah negara ini memegang peran penting secara signifikan. Salah satu wilayah yang berdekatan dengan Singapura adalah Batam. Batam sebagai kota industri dapat memberikan peluang untuk mengembangkan kerjasama sosial, ekonomi serta budaya. Hubungan yang dilakukan Indonesia-Singapura memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Peran Batam sendiri ialah untuk menjadi “gerbang” bagi investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Status *Free Trade Zone* diberikan untuk kawasan yang berpotensi dalam pengembangan investasi asing. Kebijakan ini berguna untuk memperluas probilitas dari berbagai aspek kehidupan dalam tatanan global. Batam sebagai kota berpulau (*archipelagic city-municipal islands*) berdekatan dengan negara tetangga memiliki kompleksitas yang terjadi seperti fluktuatif pada sektor ekonomi, penduduk yang mengalami progress, serta perkembangan geo-sosial, geo-politik dan geo-ekonomi (Bahrum, 2011).

Peran Pemerintah Daerah menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam memajukan FTZ dengan pemerataan berbagai bidang secara maksimal. Kebijakan Pemerintah Pusat menyerahkan status FTZ Batam, sebagai upaya representatif wujud FTZ yang ada di Indonesia. *Free Trade Zone* di Batam semestinya diperkuat dengan keimigrasiannya dan pembaruan pada transaksi keuangan, karena memiliki penduduk yang mendiami di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diberikan status FTZ dengan jangka waktu 70 tahun paling lama.

FTZ bertujuan untuk meningkatkan daya saing, dan menarik investasi asing. Faktor utama dari FTZ mengimplementasikan strategi pembangunan nasional. Pengaruh yang diterima suatu kawasan yaitu pembangunan infrastruktur yang mengalami peningkatan, pembangunan pabrik-pabrik untuk penyediaan tempat logistik, serta menjadi tempat sentral ekspor produksi nasional (RI, 2014).

Ditetapkannya Batam sebagai daerah FTZ karena tidak terlepas dari keunggulan yang dimiliki oleh Batam selama ini. Di samping memiliki keunggulan geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Batam dianggap memiliki keunggulan secara ekonomi, antara lain sebagai salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi, dikenal sebagai sentra industri elektronika terkemuka di Indonesia, serta merupakan penyumbang ekspor nonmigas kedua terbesar setelah Bali (Kuncoro,2005).

Pesatnya perkembangan industri dan investasi di Batam diiringi dengan bertambahnya kawasan industri baru yang menjadi sentra-sentra pertumbuhan industri di Batam. Sampai akhir tahun 2006, terdapat 25 kawasan industri yang tersebar di beberapa lokasi di Batam. Untuk peningkatan daya tarik investasi, pengelola kawasan industry melengkapi berbagai fasilitas di dalam kawasan industri antara lain ketersediaan *dormitori* bagi karyawan, sarana publik, ketersediaan *utilitas*, jasa *maintenance* serta kemudahan dalam akses transportasi ke pelabuhan dan bandara (Otorita Batam, 2006).

Dengan ditetapkannya FTZ di Batam, pemerintah pusat atau daerah, Otorita Batam, pengusaha beserta juga pengelola kawasan berupaya memanfaatkan momentum tersebut untuk dapat meningkatkan daya saing Batam agar dapat menarik PMA (Penanaman Modal Asing) ke Indonesia. PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio.

### 1.9.3 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada skripsi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Fokus Penelitian

| Variabel   | Dimensi  | Indikator   | Deskripsi   |
|--|--|---|---|
| Paradiplomasi<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Dalam<br>Lingkup<br>Perdagangan<br>Bebas ( <i>Free<br/>Trade Zone</i> )<br>di Batam | Menggunakan <i>treaty-making power</i>                   | Pembuatan Perjanjian oleh Pemerintah Daerah   | Menggunakan kekuatan daerahnya untuk membuat perjanjian dengan aktor subnasional lainnya demi kepentingan daerah. |
|  | Menarik investasi asing dan mempromosikan proyek bersama | Menciptakan kondisi untuk menarik invesmen asing.   | Berusaha menarik invesmen asing yang berdampak pada FDI (Foreign Direct Investment)                               |
|  | Membuat citra positif                                    | 1. Melakukan kampanye publik seperti mengadakan pameran, festival, maupun iklan.<br>2. Membentuk citra positif untuk memainkan peran penting di hubungan internasional. | Melakukan berbagai pendekatan untuk mempromosikan citra dari aktor subnasional.                                   |
|  | Meningkatkan keterikatan                                 | Membuat rasa keterikatan dengan persamaan sejarah seperti ras, budaya, bahasa, kedekatan wilayah dll.   | Meningkatkan keterikatan dengan aktor subnasional lainnya.  |

#### **1.9.4 Unit Analisis**

Menurut Hamidi (Hamidi, 2004) unit analisis merupakan sesuatu yang diteliti berupa individu, organisasi atau lembaga, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu sebagai subjek penelitian. Unit analisis berupa satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek atau sasaran penelitian (sasaran yang dijadikan analisis atau fokus yang diteliti).

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis nya adalah Pemerintah Daerah Batam sebagai aktor subnasional yang melakukan aktivitas paradiplomasi.

#### **1.9.5 Jenis dan Sumber Data**

##### **A. Jenis Data**

Data yang akan digunakan oleh peneliti berupa data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata atau kalimat verbal. Data kualitatif ini dapat diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumentasi/analisis dokumen.

##### **B. Sumber Data**

Adapun sumber yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan proposal skripsi ini ialah menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada yang berupa buku, jurnal, dokumen, berita, literatur serta hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, beberapa karakteristik dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data adalah bentuk dokumen yang bisa dibaca, tidak pernah diproduksi secara spesial dengan tujuan untuk penelitian sosial, tersedia dan bisa dianalisis, serta berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian sosial. Dokumen dalam sumber data dapat berupa hal yang tertulis maupun dapat berupa visual. Sumber juga bisa didapat dari media massa seperti koran, majalah, program tv, film, internet maupun media massa lainnya yang bisa berpotensi sebagai sumber dalam menganalisis penelitian sosial (Bryman, 2012)

### **1.9.7 Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data menurut Semiawan (2010: 134) adalah teknik dengan menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian dengan menggunakan bermacam-macam data, menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan melibatkan lebih banyak peneliti. Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2014). Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Menurut Sugiyono triangulasi dibagi tiga, antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. Dalam hal ini peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber saja karena peneliti tidak melakukan pengambilan data melalui narasumber dan triangulasi sumber pun sudah mampu menjawab penelitian dari peneliti.

#### **1.9.8 Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data, dalam penelitian ini analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian melakukan verifikasi dari data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman ada tiga langkah dalam teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992) .

Reduksi data dapat berbentuk rangkuman dengan memilih hal-hal penting dan memilih data yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang telah ada kemudian data tersebut akan dipilih dan dicocokkan dengan penelitian yang diambil. Selanjutnya, data yang cocok akan disederhanakan dengan maksud mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema tertentu. Data yang tersebar akan dipadukan dan peneliti akan menelusuri tema untuk

merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data menjadi sebuah uraian singkat.

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi yang telah dikumpul kemudian disusun, sehingga dapat diperoleh kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan langkah dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini terdiri dari teks naratif, tabel, dan bagan yang disusun secara sistematis sehingga nantinya akan mudah untuk dipahami.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penyimpulan data-data didapatkan sesuai dengan kerangka teori yang dipakai. Kesimpulan yang didapatkan akan dijadikan intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan data-data penelitian dengan hipotesis termasuk alasan-alasan yang menyebabkan data-data penelitian berbeda dengan hipotesis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bahrum, S. (2008). *SEZ & Paradoks Ekonomi Pembangunan*. Pekanbaru: Unri Press.
- Bahrum, S. (2011). *Mercusuar Batam Madani, Potret & Pengembangan FTZ Batam*. Pekanbaru: Unri Press.
- Bunnell., T. (2011). *Geographies of Power in the Indonesia–Malaysia–Singapore Growth Triangle. International Handbook of Globalization and World Cities*. Edward Elgar Press.
- Hidayat, S., & Hidayat, A. S. (2010). *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jatmika, S. (2001). *Otonomi Daerah (Perspektif Hubungan Internasional)*. Yogyakarta: Bigraf Press.
- Lesar,. A., K. (2003). *FTZ Batam Demi Kemakmuran Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Press.
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy (Kerjasama Luar Negeri oeh Pemda di Indonesia)*. Yogyakarta: The Phinisi Press

Muliono, H. (2003). *Batam Free Trade Zone: Sebuah Kiat Pembangunan Ekonomi*. Depok: LP3ES Indonesia Press.

Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press.

## **Jurnal**

Apriliyanti, R. (2015). *Upaya diplomasi Indonesia pada peningkatan investasi asing di kota Batam, provinsi Kepulauan Riau (Studi kasus diplomatic tour, Batam 7-9 September 2012)*. *Jom Fisip*, 2(1), 1–14. <https://media.neliti.com/media/publications/31819-ID-upaya-diplomasi-indonesia-pada-peningkatan-investasi-asing-di-kota-batam-provins.pdf>

Fathun, L. M. (2016). *Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar*. *Indonesian Perspective*, 1(1), 75–94. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10430>

Harakan, A. (2018). *Paradiplomasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dan Sosial Di Kabupaten Bantaeng*

Pahlawan, Indra. (2014). *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam Penetapan Kawasan Special Economic Zone di Wilayah Batam, Bintan, Karimun (BBK)*, Universitas Riau: Hubungan Internasional. <http://repository.unri.ac.id/>

Pujayanti, A. (2016). *Peran Daerah dalam Diplomasi Ekonomi*. *Politica*, 7(1), 78–101. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/viewFile/1118/611>

Putri, R. A. (2019). *Menakar Paradiplomasi Batam dalam Lingkup Free Trade Zone melalui Analisis Isi Regulasi*.

- Rumengan J., “Prespektif Hukum dan Ekonomi atas kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah daerah”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 6, No.2, 2009
- Puspapertiwi, S., Susiatiningsih, H., Farabi, N., & Paramasatya, S. (2018). *Memperkuat Lokalitas Kota Semarang di Era Globalisasi melalui Diplomasi Lokal*. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 1-15.
- Sinaga, O.,. (2010). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi Kerjasama Internasional*
- Wolff, S. (2007). *Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges*. *The Bologna Center Journal of International Affairs*, 10(1), 141-150.
- Wong., K. & Chu., D. (1984). *Export Processing Zones And Special Economic Zones As Generators Of Economic Development: The Asian Experience*. *Geografiska Annaler*, WileyBalckwell halaman 1-16
- Zaenuddin, M, W. Kumorotomo, Samsubar S, Heruanto H. (2017). *Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ)*.  
<http://dx.doi.org/10.25105/semnas.v0i0.2173>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Fasilitas Istimewa Kawasan Perdagangan Bebas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kotamadya Batam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Syarat Kerjasama Sistercity.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

### **Halaman Web**

Badan Pusat Statistik Kota Batam. (n.d). *Badan Resmi Statistik Kota Batam*. Badan Pusat Statistik Kota Batam, Batam – Indonesia.  
[https://batamkota.bps.go.id/website/brs\\_ind/brsInd-20170216040753.pdf](https://batamkota.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170216040753.pdf)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (BPM-PTSP). (2016). *Penandatanganan MoU Dengan Pemerintah Kota Gimje, Korea Selatan*.  
<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/promosi-investasi/luar-negeri-2/2011-2015/penandatanganan-mou/index.html>

Bappenas. (2009). *Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia. Bulletin Kawasan Edisi 24*.  
<http://kawasan.bappenas.go.id/produk/buletin-kawasan/33-kawasan-strategis-ekonomi-indonesia>

BP Batam. (n.d). *Industri & Ekonomi: Panduan Investasi*. Badan Pengusahaan Batam:  
[https://www.bpbatam.go.id/ini/Industry\\_economy/invest\\_guide.jsp](https://www.bpbatam.go.id/ini/Industry_economy/invest_guide.jsp)

BP Batam. (n.d.). *Destinasi Wisata di Batam*. <https://bpbatam.go.id/tentang-batam/destinasi-wisata/>

Kepri, R. (2014). *Sejarah Kepulauan Riau*. <https://www.keprinews.com/2014/08/sejarah-kepulauan-riau.html>

Pemerintah Daerah Kota Gimjae. (n.d.). Balai Kota Gimjae dan informasi Kota Gimjae dalam situs website. <http://www.gimje.go.kr/foreign/english/sub1/sub1.jsp>

Shaw., M. (2016). "*Treaty International Relation*", Encyclopedia Britannica, last modified 2016, <https://www.britannica.com/topic/treaty>.

Sunseap Group. (2021). *Sunseap signs MOU with BP Batam to build world's largest floating solar farm and energy storage system*. <https://www.sunseap.com/SG/newsroom/2021/sunseap-signs-MOU-with-BP-Batam-to-build-worlds-largest-floating-solar-farm-and-energy-storage-system.html>

### **Publikasi Pemerintah**

RI, K. K. (2014). *Kajian Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam*. Tanjungpinang